



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2020**

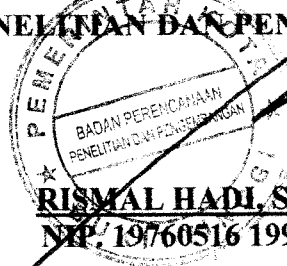
KATA PENGANTAR

P

uji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah, S.W.T, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020 harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui perencanaan, penelitian dan pengendalian pembangunan yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bapelitbang selama tahun 2020. Diharapkan LKIP Bapelitbang ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian Kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi di Tahun 2020. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kota Bukittinggi.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Isu Strategis SKPD.....	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2016-2021	7
2.2 Perjanjian Kinerja Bapelitbang	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Realisasi Keuangan	24
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kota Bukittinggi, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kota Bukittinggi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bapelitbang dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kota Bukittinggi, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, LKIP Tahun 2020 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap sasaran tersebut, terdapat indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Dengan adanya kondisi pandemi covid-19 yang dimulai sekitar bulan Maret 2020 maka dilakukan beberapa kebijakan dalam penggunaan anggaran yang sebahagian dialihkan untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19 untuk membantu masyarakat Kota Bukittinggi secara langsung. Dalam Anggaran Perubahan Bapelitbang sendiri dilakukan pengalihan (refocusing) untuk penanggulangan pandemi covid-19 sebesar 31,52%. Penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung pada akhir tahun 2020 sebesar 95,52 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar 77,68 %. Sehingga total realisasi belanja Bapelitbang Kota Bukittinggi pada tahun 2020 adalah sebesar 89,10% dari anggaran yang tersedia.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

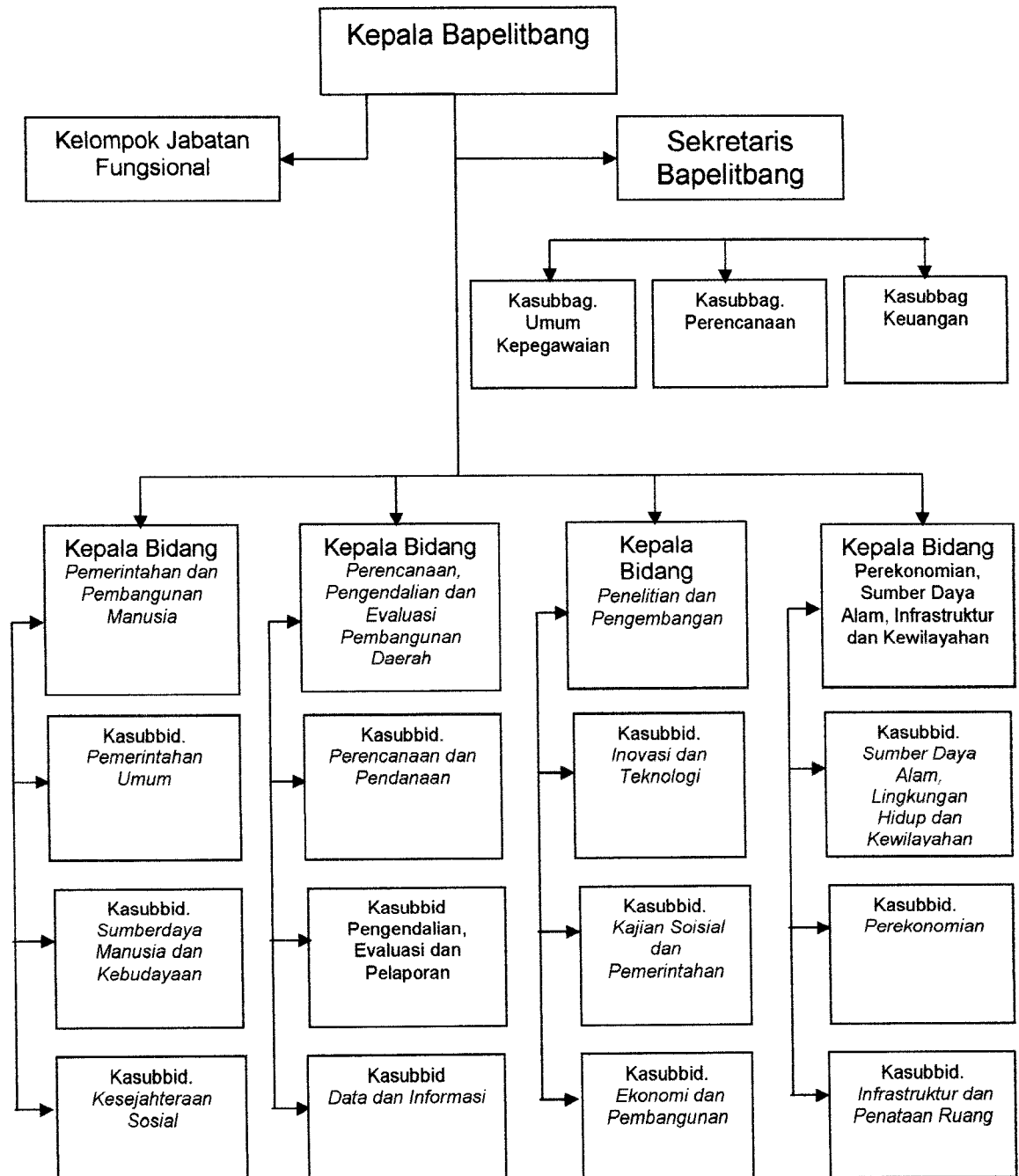
Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi serta Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kota Bukittinggi yang merupakan unsur urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang tugas Walikota di Bidang Perencanaan dan penelitian, pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Telah ditegaskan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan Urusan Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksana Kebijakan Teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan
3. Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan Administrasi Badan dan Pelaksana Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Seesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu oleh Sekretaris serta 4 (empat) Bidang yang membantu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bukittinggi



1.3 Isu Strategis SKPD

Tingkat kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi pada tahun 2020 dikategorikan berhasil terkait dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka menengah dan tahunan, namun hal ini perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Untuk dapat meningkatkan kinerja kedepan, Bapelitbang akan menemui tantangan dan kendala. Adapun tantangan dan kendala tersebut antara lain adalah :

1. Keterbatasan anggaran.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang akan sangat mempengaruhi pencapaian tingkat kinerja Bapelitbang, dimana anggaran merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang akan mendukung pencapaian kinerja.

2. Personil

Jumlah personil pada Bapelitbang saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan beban tugas yang diemban oleh Bapelitbang sesuai dengan hasil analisa Jabatan.

3. Jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat pendek dan beban tugas Bapelitbang yang cukup berat menjadi tantangan dalam pencapaian target kinerja.

4. Terjadinya kondisi global pandemi covid-19 mulai sekitar bulan Maret 2020 yang melanda dunia yang berdampak pada kebijakan penggunaan anggaran pada pemerintah Kota Bukittinggi, juga pada Bapelitbang, Refocusing dilakukan terhadap 23 Kegiatan dan 13 Kegiatan diantaranya di tunda pelaksanaannya pada tahun 2020 ini. Namun dengan adanya refocusing kegiatan tersebut tidak berpengaruh terlalu besar dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terutama dalam hal menyusun dokumen perencanaan.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja Bapelitbang adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD. Capaian untuk indikator kinerja terkait kualitas perencanaan pada 2020, dapat dicapai walaupun menghadapi kendala internal maupun eksternal seperti kondisi pandemi covid-19 yang berlangsung sampai saat ini. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Bapelitbang dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan OPD se-Kota Bukittinggi
2. Penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan OPD
3. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
4. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi
5. Penguatan kapasitas kelembagaan Bapelitbang serta kapasitas Sumber Daya Aparatur Bapelitbang
6. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan
7. Penyediaan Aparatur Fungsional Perencana yang belum terlaksana

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN



istematika penyajian Laporan Kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020 meliputi Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2016 - 2021.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan pencapaian kinerja Bapelitbang dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran strategis untuk Tahun 2020 dengan analisis kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPELITBANG Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja juga memberikan target (quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan visi/misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2020 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

2.1 RENCANA STRATEGIS BAPELITBANG TAHUN 2016-2021

Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, Bapelitbang Kota Bukittinggi lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya kota secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk waktu satu dalam periode RPJMD dengan

diformasikannya tujuan strategis dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur, rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun . Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.
- Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
- Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
- Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang ditetapkan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan visi dan misi Walikota Bukittinggi, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan 4(empat) sasaran.

a. Tujuan :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif
2. Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

b. Sasaran :

Sasaran strategis Bapelitbang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode

secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

Sasaran strategis Bapelitbang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Bapelitbang dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bapelitbang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga tercapai.

Sasaran dan Program Bapelitbang Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

TUJUAN 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.	- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%
		- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	100%
		- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	100%

TUJUAN 2: Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	- Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	100%
		- Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi Daerah Tetangga dan Nasional	100%
2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	- Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%

TUJUAN 3: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	- Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunanMeningkatkan	25

2.2 PERJANJIAN KINERJA BAPELITBANG

Perjanjian Kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2020 dijabarkan kedalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA BAPELITBANG TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	248.142.000,00
				Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	297.153.500,00
				Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	49.309.000,00
				Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	270.748.000,00
				Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	279.965.000,00
				Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	200.000.000,00
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	100%	Penyusunan KLHS RPJMD	197.842.500,00
				Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	319.108.948,00
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang			

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
2	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	100%	Review dan Sinkronisasi RPLJM Kota Bukittinggi	27.688.944,00
				Koordinasi Komisi Irigasi	24.290.750,00
				Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	40.258.500,00
				Koordinasi Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga	303.838.500,00
				Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	107.231.000,00
				Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	52.826.500,00
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional	100%	Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah	239.764.000,00
				Pembinaan Teknis Kota Sehat	89.429.000,00
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	100.411.634,00
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	55.655.880,00
				Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	75.116.500,00
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	149.846.000,00
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	71.700.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	96.750.000,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
3	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	42.990.000,00
				Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan	389.838.711,50
4	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunanMeningkatkan	25	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	121.399.550,00
				Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 2021-2025	128.284.000,00
				Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat	139.697.500,00
				Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah	289.631.000,00
				Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) Kota Bukittinggi	124.133.500,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A kuntabilitas Kinerja Bapelitbang merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2020.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A kuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2020 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bapelitbang tahun 2020 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbang dengan Walikota Bukittinggi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Pada Perjanjian Kinerja telah dirumuskan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang didukung oleh 7 (tujuh) program dan 22 kegiatan setelah dilakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan dampak covid-19 di Bukittinggi. Analisis dan evaluasi kinerja terhadap sasaran diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambil keputusan manajemen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Pemerintah Kota Bukittinggi pada umumnya untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

P

encapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1.1.1 Sasaran Strategis “terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan” dengan indikator sasaran Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek. Pencapaian kinerja terhadap sasaran ini diukur dengan cara : Membandingkan jumlah kegiatan usulan yang disepakati masyarakat melalui musrenbang kelurahan yang diakomodir pada RKPD dibandingkan dengan jumlah usulan kegiatan masyarakat yang disepakati dan diusulkan melalui musrenbang kelurahan.

$$\% \text{ usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek} = \frac{\text{jumlah kegiatan usulan yang disepakati masyarakat melalui musrenbang kelurahan yang diakomodir pada RKPD}}{\text{jumlah usulan kegiatan masyarakat yang disepakati dan diusulkan melalui musrenbang kelurahan}}$$

Total usulan masyarakat yang ditampung pada RKPD Tahun 2020 adalah sebanyak 257 usulan, sedangkan total usulan masyarakat pada musrenbang adalah sebanyak 288 usulan, sehingga persentase usulan masyarakat yang ditampung pada RKPD 2020 adalah sebesar 89,24%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%	257	89.24%

3.1.1.2 Sasaran Strategis “Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan” dengan indikator sasaran :

- Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek.

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah program/kegiatan pada RKPD yang memiliki keselarasan dengan sasaran kinerja dibandingkan dengan jumlah program/kegiatan yang ada pada RKPD

$$\text{\% Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek} = \frac{\text{jumlah program/kegiatan pada RKPD yang memiliki keselarasan dengan sasaran kinerja}}{\text{jumlah program/kegiatan yang ada pada RKPD}}$$

Total Program yang ada pada RPJMD kota Bukittinggi 2016-2021 adalah sebanyak 206 Program sedangkan program yang diakomodir pada RKPD tahun 2020 adalah sebanyak 172 Program, dimana semua program yang ada pada RKPD tahun 2020 terakomodir pada RPJMD Tahun 2016-2021. Dengan demikian tingkat keselarasan RKPD tahun 2020 adalah sebesar 100%

- b. Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah program prioritas Propinsi dan Nasional yang dituangkan dalam RKPD dibandingkan dengan Jumlah Program Prioritas Propinsi dan Nasional.

$$\text{\% Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional} = \frac{\text{jumlah program prioritas Propinsi dan Nasional yang dituangkan dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program Prioritas Propinsi dan Nasional.}}$$

Dalam RKP tahun 2020, telah ditetapkan 5 Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah
3. Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Dalam RKPD Kota Bukittinggi tahun 2020 turut mendukung prioritas nasional dalam bentuk program kegiatan, antara lain mendukung prioritas nasional dalam hal :

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
 2. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
 3. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
 4. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
 5. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
- dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa prioritas nasional dan propinsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, semuanya diakomodir dalam RKPD Tahun 2020.

Secara urusan kewenangan daerah dari 5 (lima) priporitas nasional ada 1 (satu) yaitu stabilitas pertahanan dan kemanan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga secara urusan kewenangan daerah terpenuhi keselarasan 100% dengan prioritas nasional.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan	Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	100%	100%	100%
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional	100%	100%	100%

3.1.1.3 Sasaran Startegis “Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah”

dengan indikator Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah elemen data yang tersedia dengan lengkap pada dokumen perencanaan (RKPD) dibandingkan dengan seluruh jumlah elemen data yang dibutuhkan oleh RKPD

$$\frac{\% \text{ ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan}}{= \frac{\text{jumlah elemen data yang tersedia dengan lengkap pada dokumen perencanaan (RKPD)}}{\text{jumlah elemen data yang dibutuhkan oleh RKPD}}}$$

Dalam penyusunan RKPD, dibutuhkan beberapa elemen data pendukung antara lain adalah :

1. Hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan
2. Permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah
3. Arah kebijakan nasional dan propinsi
4. Kondisi ekonomi daerah
5. Proyeksi keuangan daerah

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2020, semua elemen data yang dibutuhkan tersebut secara keseluruhan dapat terpenuhi.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%

- 3.1.1.4 Sasaran Startegis “Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan” dengan indikator Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan.

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan program/ kegiatan strategis dibandingkan dengan jumlah hasil penelitian yang dilakukan

$$\frac{\text{\% hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan}}{\text{jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan program/ kegiatan strategis}} = \frac{\text{jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan program/ kegiatan strategis}}{\text{jumlah hasil penelitian yang dilakukan}}$$

Penelitian pada tahun 2020 direncanakan sebanyak 8 penelitian, dengan dilakukannya refocusing anggaran pada tahun 2020 kegiatan penelitian dikurangi 2 buah, sehingga penelitian yang terlaksana sebanyak 6 penelitian, dari hasil penelitian tersebut seluruhnya dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan, sehingga persentase pencapaian hasil penelitian sebesar 24%, namun jika dibandingkan dengan target jumlah penelitian yang harus dilakukan pada tahun 2020, realisasi penelitian di tahun 2020 tidak mencapai target yang diharapkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan	25	6	24%

Pada Tahun 2020 telah disusun dokumen perencanaan sebanyak 7 (tujuh) dokumen perencanaan yaitu:

1. Penyusunan RKPD 2021 Kota Bukittinggi
2. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah
3. Penyusunan Perubahan RKPD 2020 Kota Bukittinggi
4. Penyusunan KLHS RPJMD
5. Penyusunan KUA PPAS 2021 Kota Bukittinggi
6. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan 2020 Kota Bukittinggi
7. Rekapitulasi Usulan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2022 sampai 2026.

Semua dokumen perencanaan tersebut dapat disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu. Regulasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut secara teknis adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja untuk sasaran strategis Perencanaan Pembangunan telah disusun secara Prosedural mencapai 100%.

Dokumen perencanaan yang disusun pada tingkat kota pada tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu dokumen perencanaan tahunan (RKPD) juga merupakan bahan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang nantinya juga merupakan pedoman dalam menyusun APBD pada tahun berikutnya.

Dari 22 (dua puluh dua) kegiatan dilaksanakan setelah dilakukan refocusing anggaran yang mendukung sasaran strategis perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terintegrasi, maka diperoleh realisasi target capaian kinerja mencapai 87.09 % dari target indikator sasaran 100%.

Untuk kegiatan Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi tidak dilaksanakan dan menghasilkan dokumen . Hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 terhadap kegiatan ini.

3.1.2 Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018 s/d 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran			
				2018	2019	2020
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	98%	90,74%	89.24%
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen	90%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2018	2019	2020
			perencanaan Jangka Menengah			
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	90%	100%	100%
2	Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Keselarasn Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	90%	100%	100%
			Keselarasn Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi ,Daerah Tetangga dan Nasional	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	90%	100%	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah	20	9	6

Sasaran strategis Perencanaan Pembangunan Daerah telah disusun secara Prosedural pada Tahun 2020 dalam kondisi tetap jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sama-sama hampir mencapai 100%, hal ini disebabkan karena Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya bisa dilaksanakan sesuai rencana.

3.1.3 Analisis Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Kinerja yang ada pada Renstra

Realisasi Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang ada pada Renstra Bapelitbang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Target Kinerja Sasaran Strategis Pada Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	80%	90%	100%	90,74%	89.24%
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	80%	90%	100%	100%	100%
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	80%	90%	100%	100%	100%
2	Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	80%	90%	100%	100%	100%
			Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketersediaan data dan	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam	80%	90%	90%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2016	2017	2018	2019	2020
		informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	penyusunan dokumen perencanaan					
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah	10	15	20	9	6

SUMBER : Data Realisasi 2016,2017,2018,2020 dan RPJMD

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2020 dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor yang dijelaskan pada analisis keberhasilan dan kegagalan dibawah ini.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

- Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kota Bukittinggi terhadap pelaksanaan program kegiatan;
- Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya:

- Kurangnya SDM Perencana

- b. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
- c. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan
- d. Terjadinya kondisi pandemi covid-19 dimulai bulan Maret 2020

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

- a. Mengusulkan pemenuhan formasi JFT Perencana dan mengoptimalkan pegawai Non PNS
- b. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian dan monitoring
- c. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- d. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- f. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang Kota Bukittinggi didukung oleh ketersediaan Sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya sarana prasarana kantor. Pada tahun 2020 personil Bapelitbang berjumlah 34 orang dengan 21 pejabat struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Bapelitbang, Sekretaris dan 4 Kepala Bidang dan 15 Kasubbag, Kasubbid serta 11 fungsional Umum dan Tenaga PPPK sebanyak 2 orang. Dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Bapelitbang dimana ketersediaan fungsional umum sangat sedikit sekali, untuk setiap pejabat struktural eselon IV hanya terdapat 1 orang dan ada yang tidak dibantu oleh fungsional umum yang menyebabkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan tepat waktu sangat kewalahan sehingga Bapelitbang sangat sering melaksanakan lembur-lembur diluar jam kantor untuk mengejar penyelesaian kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.

Ketersediaan sumberdaya sarana prasarana kantor Bapelitbang sudah cukup baik, baik itu ketersediaan peralatan maupun perlengkapan kantor yang sangat berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan dan pencapaian target kinerja Bapelitbang secara umum.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2020 Bapelitbang menyelenggarakan Urusan Perencanaan Pembangunan yang didukung oleh 9 program dengan 43 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja dinyatakan dengan predikat sebagai berikut :

Tabel 3.4
Predikat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT	CAPAIAN KINERJA SASARAN
1	100 %	Sangat Baik	3
2	85 % s/d < 100 %	Baik	1
3	70 % s/d < 85 %	Sedang	-
4	0 % s/d < 70 %	Kurang Baik	-

Empat sasaran strategis ditentukan oleh capaian tujuh indikator sasaran sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja utama masing-masing indikator. Dari tujuh indikator tersebut 6 indikator berpredikat sangat baik karena memperoleh capaian kinerja 100% Penjabaran lebih lanjut kondisi pencapaian indikator sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Predikat **Sangat Baik** , dicapai oleh indikator :

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah “Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan” dengan nilai capaian 100 % yang dicapai dengan kegiatan:

1. Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan mencapai 100%
2. Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi mencapai 100%
3. Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi mencapai 100%
4. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah mencapai 100%
5. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan mencapai 100%
6. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi mencapai 100%
7. Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi mencapai 100%
8. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi mencapai 100%

9. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 mencapai 100%
10. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia mencapai 100%
11. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan mencapai 100%
12. Penyusunan KLHS RPJMD mencapai 100%
13. Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah mencapai 100%

b. Predikat **Baik** ($85\% \leq 100\%$) dicapai oleh indikator:

Capaian ber predikat baik dicapai oleh indikator lainnya antara lain oleh kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dengan capaian 90%
2. Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah dengan capaian 90%
3. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan capaian 90%
4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan capaian 95%

c. Predikat **Sedang** ($70\% \leq 85\%$) dicapai oleh indikator:

1. Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi dengan capaian 81%
2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan capaian 70%

d. Predikat **Kurang Baik** ($0\% \leq 70\%$) dicapai oleh indikator:

1. Pembinaan Teknis Kota Sehat dengan capaian 30%
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan capaian 60%
3. Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat dengan capaian 10%

3.2 REALISASI KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Bapelitbang didukung oleh pendanaan baik berupa Belanja Pegawai maupun belanja penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi tahun 2020. Rincian anggaran belanja dan realisasinya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5
Rincian Belanja dan Realisasinya

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
TOTAL BELANJA	6,751,160,003	6,015,229,185	89.10%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,885,034,459	3,788,796,344	97.52%
Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	1,724,142,390	1,706,378,600	98.97%
Tunjangan Keluarga	171,137,368	169,353,082	98.96%
Tunjangan Jabatan	212,515,750	210,220,000	98.92%
Tunjangan Fungsional Umum	29,311,750	29,005,000	98.95%
Tunjangan Beras	87,293,257	86,397,060	98.97%
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4,197,991	3,706,692	88.30%
Pembulatan Gaji	23,310	21,314	91.44%
Iuran Asuransi Kesehatan	130,568,681	126,032,004	96.53%
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3,555,949	3,520,656	99.01%
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10,668,013	10,562,127	99.01%
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	606,015,000	571,292,556	94.27%
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	905,605,000	872,307,253	96.32%
Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN	0	0	0.00%
BELANJA LANGSUNG	2,866,125,544.00	2,226,432,841	77.68%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	771,601,700	670,247,989	86.86%
Penyediaan jasa surat menyurat	2,800,000	33,000	1.18%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68,540,000	44,940,247	65.57%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	200,014,712	169,529,386	84.76%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	192,476,000	188,189,000	97.77%
Penyediaan alat tulis kantor	19,438,450	16,055,450	82.60%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,837,000	12,970,580	68.86%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,746,538	3,327,500	57.90%
Penyediaan makanan dan minuman	18,975,000	14,659,040	77.25%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	212,324,000	197,438,786	92.99%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,500,000	6,455,000	56.13%
Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	20,950,000	16,650,000	79.47%
Program peningkatan disiplin aparatur	10,200,000	10,098,000	99.00%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10,200,000	10,098,000	99.00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0.00%
Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti	0	0	0.00%
Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan	0	0	0.00%
Program pengembangan data/informasi	196,532,712	121,660,261	61.90%
Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan	196,532,712	121,660,261	61.90%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	63.155,850	52.010,485	82.35%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	52,293,500	43,951,285	84.05%
Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	10,862,350	8,059,200	74.19%
Koordinasi Komisi Irigasi	0	0	0.00%
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	326,000	326,000	100.00%
Koordinasi Pengelolaan data AMPL Berbasis Rumah Tangga	0	0	0.00%
Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	326,000	326,000	100.00%
Program perencanaan pembangunan daerah	1,205,534,528	895,198,458	74.26%
Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	133,261,228	121,282,176	91.01%
Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	42,990,000	34,576,000	80.43%
Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	147,309,500	73,499,994	49.89%
Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	38,387,000	27,435,625	71.47%
Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	266,323,000	247,221,540	92.83%
Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	266,611,000	237,769,003	89.18%
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	145,856,500	25,857,400	17.73%
Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	164,796,300	127,556,720	77.40%
Program perencanaan pembangunan ekonomi	36,788,705	33,356,855	90.67%
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	36,788,705	33,356,855	90.67%
Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	0	0.00%
Program perencanaan sosial dan budaya	81,010,800	71,116,021	87.79%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	68,240,000	63,323,121	92.79%
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	402,500	402,500	100.00%
Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	0	0	0.00%
Pembinaan Teknis Kota Sehat	2,008,300	1,978,600	98.52%
Penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah	0	0	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	10,360,000	5,411,800	52.24%
Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	500,975,250	372,418,772	74.34%
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	56,112,000	51,650,237	92.05%
Penguatan Sistem Inovasi Daerah	95,339,550	26,382,405	27.67%
Penyusunan KLHS RPJMD	194,492,500	174,386,830	89.66%
Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 2021-2025	0	0	0.00%
Penyusunan Indeks Partisipasi Masyarakat	2,000,200	2,000,200	100.00%
Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) Kota Bukittinggi	0	0	0.00%
Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah	153,031,000	117,999,100	77.11%

Dari tabel diatas terlihat bahwasanya Bapelitbang merupakan SKPD yang tidak memiliki sumber pendapatan yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Pada tahun 2020 ini Bapelitbang mengelola Anggaran seluruhnya sebesar Rp.6.751.160.003.- (Enam Milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus enam

puluh ribu tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 6.015.229.185 (Enam Milyar lima belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan capaian keuangan 89.10%. Rincian belanja Bapelitbang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak langsung merupakan belanja Pegawai berupa pembayaran gaji pegawai, tunjangan, iuran jaminan kesehatan dan jaminan kematian yang diberikan kepada pegawai Bapelitbang setiap bulannya. Belanja tidak langsung yang dikelola Bapelitbang adalah sebesar Rp 3,885,034,459.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,788,796,344 dan capaian kinerja keuangan yang sangat baik yaitu sebesar 97,55%.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Bapelitbang yang dikelola untuk penyelenggaraan program dan kegiatan dialokasikan sebesar Rp2,866,125,544.00 dengan realisasi sebesar Rp2,226,432,841.00 dengan capaian kinerja keuangan yang cukup baik yaitu sebesar 77.68% Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa serta Belanja Modal

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan adanya komitmen Bapelitbang Kota Bukittinggi untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja. Secara ringkas seluruh capaian kinerja Bapelitbang pada Tahun 2020, telah memberikan gambaran dan dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam perencanaan pembangunan pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Bapelitbang Kota Bukittinggi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengendalian program pembangunan daerah yang diemban oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi dengan memperkuat peran kelembagaan Bapelitbang Kota Bukittinggi sehingga Kinerja Bapelitbang Tahun 2021 dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan penelitian dan pengendalian pembangunan di masa mendatang, melalui:
 - a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;

- d. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - f. Penguatan fungsi penelitian terhadap permasalahan pembangunan;
 - g. Peningkatan pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan Kota Bukittinggi.
4. Inovasi untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang lebih efektif melalui perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran menjadi “bottom up” sesuai kebutuhan organisasi.
5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
6. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bapelitbang Kota Bukittinggi untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dari analisis pada Bab III, dapat dilihat bahwa 13 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dikategorikan dalam pencapaian indikator sangat baik, 4 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dikategorikan pencapaian indikator baik, 2 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dikategorikan pencapaian indikator sedang dan 3 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dikategorikan pencapaian indikator kurang baik.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

RISMAL HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004

LAMPIRAN

LAKIP BAPELITBANG KOTA BUKITTINGGI TA 2020
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi Tahun 2020		Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2018		Realisasi Tahun 2017		Realisasi Tahun 2016		Kendala/Hambatan
						Fisik	Kemangan	Fisik	Kemangan	Fisik	Kemangan	Fisik	Kemangan	Fisik	Kemangan	
1	Terakomodinya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	100%	133,261,228	100%	121,282,176	100%	71,914,928	100.00	50,163,907	100%	124,047,490	100%	26,918,775	
			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	0%	0		0	100%	65,115,981	100.00	54,049,040					
			Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi	0%	38,387,000	100%	27,435,625	100%	34,347,655	100.00	29,811,700	100%	61,556,825	0%	-	
			Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	100%	147,309,500		73,499,994	100%	87,937,606	90.00	26,489,960	100%	108,702,825	0%	-	
			Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah	100%	42,990,000	100%	34,576,000	100%	8,940,700	-	2,847,000	100%	2,942,300	100%	3,713,750	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan	0%	0		0	100%	88,820,935	100.00	47,605,430	100%	51,291,582	0%	-	Refocusing 2020
			Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi	100%	266,323,000	100%	247,221,540	100%	179,599,750			100%	190,341,600	100%	149,023,550	
			Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi	100%	266,611,000	100%	237,769,003	100%	161,260,618			100%	186,283,100	100%	141,420,375	
			Penyusunan KLHS RPJMD	100%	194,492,500	100%	174,386,830	100%	5,737,500							
			Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026	100%	145,856,500	100%	25,857,400									
			Koordinasi Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	100%	164,796,300	90%	127,556,720									
				0%					0							
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang													

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi Tahun 2020		Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2018		Realisasi Tahun 2017		Realisasi Tahun 2016		Kendala/Hambatan
						Fiasko	Kemajuan	Fiasko	Kemajuan	Fiasko	Kemajuan	Fiasko	Kemajuan	Fiasko	Kemajuan	
2	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Keseluruhan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	Koordinasi Pelaksanaan rencana Aksi Daerah Pencegahan & Pemberantasan Korupsi						0	100.00	2,297,400	100%	53,296,075	0%		
			Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	0%	0			100%	203,253,664	100.00	2,318,400					Refocusing 2020
			Penutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi	100%	326,000	81%	326,000	100%	47,017,787	100.00	70,195,991	100.00	24,968,300			
			Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0%	0			100%	57,836,325	100.00	56,281,199					Refocusing 2020
			Review dan Sinkronisasi RPLJM Kota Bukittinggi	100%	10,862,350	100%	8,059,200	100%	10,842,400	100.00	36,311,800	100.00	60,078,850			
			Penunjang Operasional Komisi Inggasi Kota Bukittinggi	0%	0		0	100%	18,464,650	70.00	7,460,550					Refocusing 2020
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	100%	402,500	70%	102,500	100%	84,469,640	100.00	128,603,626	98%	186,328,998			
			Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	0%	0			100%	25,468,053	85.00	40,338,290					Refocusing 2020
			Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat	100%	2,008,300	30%	1,978,600	100%	57,518,440	90.00	75,165,442					
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia	100%	10,360,000	100%	5,411,800									
			koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	36,788,705	90%	33,356,855	100%	65,426,796	100.00	110,718,750	100%	97,041,186	100%	84,875,500	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	100%	52,293,500	90%	43,951,285	100%	94,084,779	100.00	65,128,501	100.00	57,826,205			
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan	100%	68,240,000	95%	63,323,121	100%	112,533,887	90.00	97,310,511	95%	134,615,730	100%	137,853,000	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi Tahun 2020		Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2018		Realisasi Tahun 2017		Realisasi Tahun 2016		Kendala/Hambatan
						Fiak	Kemangan	Fiak	Kemangan	Fiak	Kemangan	Fiak	Kemangan	Fiak	Kemangan	
3	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)				100%	130,111,239			12,252,800	95%	27,690,125	0%		
			Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data				100%	41,778,806			42,585,950			100%	84,875,500	
			Penyajian Informasi dan Data Statistik Perencanaan Pembangunan	100%	196,532,712	100%		121,660,261								
4	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	100%	56,112,000	100%		51,650,237			133,993,716	100%	27,300,200			
			Penguatan Inovasi Daerah Masyarakat	100%	95,339,550			26,382,405			47,010,445			100%	41,340,000	
			Penguatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kota Bukittinggi	100%	2,000,200	10%		2,000,200								
			Penyusunan Profil Daerah dan Profil Kepala Daerah	0%	0			0	100%	94,681,102						Refocusing 2020
				100%	153,031,000	100%		117,999,100								

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(Signature)

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RISMA HADI, SSTP. M.Si
NIP. 19760516 199603 1 004